

Perubahan kondisi perekonomian pasca covid-19 berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) pengeluaran di Provinsi Aceh

Changes in post-covid-19 economic conditions based on gross regional domestic product expenditure in aceh province

Safrika^{1*}, Anisah Nasution², Abdul Muzammil³, Hamdani⁴, Bagio⁵

^{1,2,3,5}Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar

⁴Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jabal Ghafur

*Korespondensi: safrika@utu.ac.id

Diterima Tanggal 19 Januari 2024, Disetujui Tanggal 29 Juli 2024

DOI: <https://doi.org/10.51978/japp.v24i2.778>

Abstrak

Di Indonesia pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan. Kondisi perubahan pelaku ekonomi dan penurunan harga komoditas juga berimbas pada penerimaan negara. Selain itu, di saat bersamaan, belanja negara harus naik untuk kesehatan, Bantuan sosial (bansos) dan membantu pelaku usaha agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Hal ini menyebabkan adanya Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui perubahan kondisi perekonomian pasca Covid-19 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pengeluaran di Provinsi Aceh. Objek penelitian adalah APBD Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data cross section dengan metode panel data, periode waktu dari tahun 2021 sebagai tahun Covid 19 sampai dengan tahun 2022 sebagai tahun pasca covid 19 dari masing-masing data PDRB Pengeluaran. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dengan menggunakan pengujian hipotesis dengan *paired sample test*. Hasil penelitian bahwa pada tahun 2021 seiring dengan masyarakat yang mulai melakukan aktivitas perekonomian ditengah pandemi covid-19 yang sudah melandai, laju pertumbuhan kembali naik menjadi 2,79 persen serta kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,21 persen. terdapat perbedaan Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh, dengan nilai sig. (2-tailed) $0.041 < 0.05$. Penerapan PSBB (Pergerakan Sosial Berskala Besar) mempersempit pergerakan ekonomi dan kondisi berjalan normal setelah Covid-19 perekonomian mengalami peningkatan apalagi dalam hal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh yang meningkat drastis.

Kata Kunci: PDRB, pengeluaran, perekonomian

Abstract

In Indonesia, the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has caused a slowdown in national economic growth, a decrease in state revenue, and an increase in spending and financing. The changing conditions of economic actors and the decline in commodity prices also have an impact on state revenues. In addition, at the same time, state spending must increase for health, social assistance (bansos) and help businesses not to carry out massive layoffs. This has led to the Post-Covid-19 Economic Conditions based on Gross Regional Domestic Product (GRDP) Expenditure in Aceh Province. The research objective is to determine changes in post-Covid-19 economic conditions based on Gross Regional Domestic Product (GRDP) expenditure in Aceh Province. The object of research is the APBD of Aceh Province. The data used is cross section data with panel data method, time period from 2021 as Covid 19 year to 2022 as post covid 19 year of each expenditure GRDP data. Data analysis uses quantitative analysis and qualitative analysis using hypothesis testing with paired sample tests. The results showed that in 2021 along with people who began to carry out economic activities in the midst of the Covid-19 pandemic which had sloped,

the growth rate rose again to 2.79 percent and increased again in 2022 to 4.21 percent. there are differences in Post Covid-19 Economic Conditions based on Gross Regional Domestic Product (GRDP) Expenditure in Aceh Province, with a sig value (2-tailed) $0.041 < 0.05$. The implementation of PSBB (Large-Scale Social Movements) narrows economic movements and conditions run normally after Covid-19 the economy has increased, especially in terms of Gross Regional Domestic Product (GRDP) Expenditure in Aceh Province which has increased dramatically.

Keywords: economy, GRDP, expenditure

PENDAHULUAN

Negara berkembang, termasuk Indonesia, telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi belum berhasil mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi (Kemenkeu RI, 2022). Sejumlah besar negara maju dengan tingkat pendapatan tinggi gagal mengatasi masalah sosial seperti penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mereka mampu menggunakan secara bijak semua sumber daya untuk meningkatkan kemampuan dasar manusia (Bhakti *et al.*, 2018).

Salah satu ukuran otonomi daerah dalam mengeksplorasi sumber pendapatan tambahan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian daerah dalam membuat keputusan dan membuat kebijakan pembangunan berkorelasi positif dengan pendapatan asli daerah. Seharusnya ada peluang terbaik untuk menghidupkan kembali perekonomian daerah karena kontribusi yang signifikan dari belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pajak, bea masuk, hasil bisnis daerah, keuntungan, deviden, dan penjualan saham dan pinjaman lainnya merupakan bagian dari pendapatan daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat menunjukkan total produksi netto barang dan jasa yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian PAD. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin besar potensi sumber penerimaannya (Sufriadi *et al.*, 2015).

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan

taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin (BPS, 2023).

Menurut (Kuncoro, 2018), Pertumbuhan ekonomi suatu negara itu berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya yang turut menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Menurut Khalwati (2019) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Kondisi Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Februari 2020 di Provinsi Aceh turut menekan sektor-sektor ekonomi. Kondisi ini menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional mengalami kontraksi hingga ke titik minus 2,07 persen. Pandemi juga telah berdampak pada peningkatan angka pengangguran di Aceh, karena terdapat masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Data

BPS menyebutkan, PDRB Aceh (ADHB) Triwulan III 2020 mencatatkan pertumbuhan negatif yaitu sebesar 0,11 persen. Namun pada tahun 2022 Provinsi Aceh mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif. Setelah sempat minus pada tahun sebelumnya terdampak pandemi Covid-19, ekonomi Provinsi Aceh ini mampu tumbuh sebesar 5,53 persen. Setelah sempat menyentuh angka minus 2.07 pada 2020 akibat pandemi dan pada tahun 2022 ekonomi Aceh mampu bangkit dan tumbuh 5,53 persen.

Indikator ekonomi sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah, salah satunya adalah indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilihat dari sisi pengeluaran PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah dan Dilihat dari sisi produksi PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (*value added*).

PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi netto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Provinsi Aceh adalah salah satu Provinsi Aceh memiliki kewenangan otonom dalam menjalankan pemerintahan dan membangun serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, merencanakan, mengelola dan memanfaatkan potensi unggulan ekonomi secara optimal serta dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Aceh Sebagai daerah yang dalam keadaan berkembang dan terus membangun Provinsi Aceh juga mengandalkan sumber hasil alam sebagai bagian sumber pendapatan daerah,

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat melalui UU No.18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah

Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Proporsi pendapatan untuk sumber daya minyak dan gas adalah 70%. Ketetapan ini melebihi otonomi biasa yang mengatur pembagian pendapatan provinsi hanya 15% dari minyak dan 35% dari gas. Pemberian otonomi dan proporsi pendapatan yang cenderung besar ini diharapkan dapat menggenjot pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang jauh tertinggal dibandingkan kemajuan ekonomi provinsi lain di Indonesia, yang pada akhirnya pencapaian tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut (Widodo, 2018) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (*Value Added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah dari hasil produksi nilai barang dan jasa yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah/wilayah (Arsyad, 2017).

Perubahan kondisi perekonomian pasca COVID-19 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran memiliki urgensi yang tinggi karena menentukan Pemulihan Ekonomi dengan menila sejauh mana ekonomi Provinsi Aceh telah pulih setelah dampak negatif pandemi serta mengidentifikasi sektor-sektor yang pulih lebih cepat dan sektor-sektor yang masih tertinggal. Hal ini juga menjadi penentu Perencanaan Kebijakan berupa merumuskan strategi pemulihan ekonomi yang tepat. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan yang komprehensif mengenai perubahan kondisi ekonomi pasca COVID-19 dan membantu dalam proses pemulihan serta pengembangan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu indikator dalam perekonomian makro suatu wilayah, banyak faktor yang mempengaruhi PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan. Dampak dari pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional sekaligus stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. 4 Penanganan pandemik COVID-19 membutuhkan kebijakan extraordinary dari Pemerintah dan tentu berdampak pada postur APBD 2020. Kondisi perubahan pelaku ekonomi dan penurunan harga komoditas juga berimbas pada penerimaan negara. Selain itu, di saat bersamaan, belanja negara harus naik untuk kesehatan, Bantuan sosial (Bansos) dan membantu pelaku usaha agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Hal ini menyebabkan adanya Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Waktu penelitian dilakukan kurang lebih 2 bulan yakni bulan Juli sampai dengan Agustus 2023. Lokasi penelitian berada di Provinsi Aceh pada laporan Realisasi APBD. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan yang diterbitkan dari tahun 2021 sebagai tahun covid 19 sampai dengan tahun 2022 sebagai tahun pasca covid 19 dari masing-masing data PDRB Pengeluaran.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu dengan mengambil keseluruhan populasi. Objek penelitian adalah APBD Provinsi Aceh berdasarkan yang ada di Badan Pusat Statistik Aceh. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yang bersumber dari laporan

Realisasi APBD di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data cross section dengan metode panel data, periode waktu dari tahun 2021 sebagai tahun covid 19 sampai dengan tahun 2022 sebagai tahun pasca covid 19 dari masing-masing data PDRB Pengeluaran (Badan Pusat Statistik (BPS)., 2021).

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud adalah informasi yang mendukung tentang profil wilayah penelitian, serta data-data yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data-data tersebut maka tindakan selanjutnya adalah melakukan penyaringan untuk memilih data mana yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk kemudian dievaluasi agar dapat dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian.

Analisis Data

Analisis data menurut (Moleong, 2016) adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan di hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat berbentuk analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Untuk melihat perbandingan Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh digunakan pengujian hipotesis dengan paired sample, menggunakan rumus (Sudjana, 2016).

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Menurut (Widiyanto, 2013), paired sample t-test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.

Dimana hipotesis dan pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak ada perbedaan Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh

Ha : ada perbedaan Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh

- a. Jika nilai Sig. (2- tailed) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak
- b. Jika nilai Sig. (2- tailed) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Adhk)

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena sudah mencakup pajak tak langsung neto.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami perubahan dari tahun 2010 hingga tahun 2022. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh wabah pandemi covid-19 yang mulai melanda Indonesia khususnya Aceh sejak akhir

triwulan I tahun 2020 yang mengganggu aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

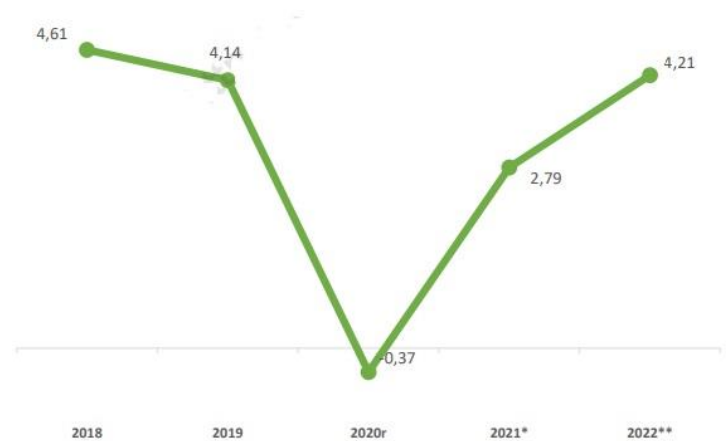
Tabel 1. Produk domestik regional bruto dengan migas adkh menurut pengeluaran (triliun rupiah) Provinsi Aceh

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
2018	126,82 Triliun
2019	132,07 Triliun
2020	131,58 Triliun
2021	135,25 Triliun
2022	140,95 Triliun

Jika dilihat secara lebih rinci, pada tahun 2018 nilai PDRB ADHK 2010 sebesar 126,82 triliun rupiah, dan menjadi 132,07 triliun pada tahun 2019. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadi penurunan PDRB ADHK 2010 pada tahun 2020 yaitu turun sekitar 0,49 triliun rupiah dibandingkan tahun 2019 sehingga menjadi 131,58 triliun rupiah. Namun pada tahun 2021, seiring dengan membaiknya kegiatan ekonomi dan wabah pandemi covid-19 yang sudah melandai, nilai PDRB ADHK 2010 kembali meningkat sebesar 3,67 triliun rupiah atau sekitar 2,79 persen dari tahun 2020 sehingga nilainya menjadi 135,25 triliun rupiah pada tahun 2021 serta terus meningkat menjadi 140,95 triliun rupiah pada tahun 2022.

Pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi Aceh, lebih efektif jika menggunakan pertumbuhan PDRB ADHK. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan ekonomi ADHK tidak dipengaruhi oleh unsur harga. Harga pada ADHK bersifat tetap dan harga yang digunakan adalah tahun 2010 sebagai tahun dasar.



Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Laju pertumbuhan ADHK 2010 pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,61 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,14 persen. Pada tahun 2020 laju ADHK 2010 mengalami penurunan menjadi 0,37 persen, hal ini erat kaitannya dengan kondisi pandemi covid-19 yang terjadi hampir disemua wilayah. Selanjutnya, pada tahun 2021 seiring dengan masyarakat yang mulai melakukan aktivitas perekonomian ditengah pandemi covid-19 yang sudah melandai, laju pertumbuhan kembali naik menjadi 2,79 persen serta kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,21 persen.

Analisis Perbandingan Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh

Analisis Perbandingan kondisi perekonomian pasca covid 19 berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) pengeluaran di Provinsi Aceh dihitung untuk mengetahui apakah ada perbedaan kondisi perekonomian pasca covid 19 dan untuk membuktikan apakah ada perbedaan tersebut berarti signifikan (nyata) atau tidak maka kita perlu menafsirkan output "Paired Sampel Test" berikut ini.

Tabel 1. Hasil paired samples test

Pair		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
1	sebelum covid 19 sesudah covid 19	-.09750	1.32790	.46948	-1.20765	1.01265	-.208	7	.041

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh, dengan nilai sig. (2-tailed) $0.041 < 0.05$. Perbedaan PDRB Provinsi Aceh sebelum dan sesudah COVID-19 disebabkan oleh beberapa faktor. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di Provinsi Aceh. Pembatasan perjalanan, penutupan bisnis,

dan perubahan perilaku konsumen mengakibatkan penurunan produksi dan pendapatan pada banyak sektor sehingga produksi barang dan jasa terbatas. Sektor pariwisata dan perhotelan yang mengalami penurunan yang signifikan karena penurunan jumlah wisatawan dan pembatasan perjalanan. Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Veni Karina (2022) yang mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap

pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah dengan menggunakan data PDRB. Penelitian ini menemukan bahwa pandemi telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan di hampir semua daerah, dengan variasi dampak tergantung pada struktur ekonomi dan ketahanan sektor-sektor tertentu.

Provinsi Aceh memiliki ketergantungan pada ekspor ke negara-negara yang juga terdampak pandemi, hal ini bisa berdampak negatif pada PDRB karena menurunnya permintaan luar negeri terhadap barang dan jasa dari wilayah Provinsi Aceh. Selain itu, Respons pemerintah terhadap pandemi, seperti *lockdown*, stimulus ekonomi, dan bantuan kepada sektor-sektor terdampak juga mempengaruhi PDRB. Pandemi COVID-19 juga merubah pola konsumsi dan produksi. Permintaan terhadap beberapa barang dan jasa bisa menurun sementara permintaan terhadap yang lain bisa meningkat sehingga menggeser kontribusi relatif sektor-sektor dalam PDRB di Provinsi Aceh.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi sejalan dengan meningkatnya produksi ekonomi masyarakat pada dua kondisi yaitu pada sebelum dan sesudah covid-19. Terdapat 22 negara yang melakukan kegiatan ekspor ke Provinsi Aceh pada tahun 2019 dan 2020. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 turut memengaruhi kegiatan impor ke Provinsi Aceh karena hampir semua negara di dunia melakukan pembatasan aktivitas publik dalam upaya menekan kasus Covid-19 di negara mereka masing-masing. Sehingga penting untuk dilakukan perbandingan realisasi nilai impor Provinsi Aceh sebelum (tahun 2019) dan pada masa pandemi pada tahun 2020. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Aceh adalah dengan melakukan pengelompokan negara-negara asal barang impor tersebut berdasarkan realisasi nilai impor Provinsi Aceh. Dengan adanya pengelompokan tersebut, Pemerintah Aceh dapat mengidentifikasi negara-negara utama yang berkontribusi besar dalam kegiatan impor dan negara-negara yang mengalami penurunan aktivitas ekspor ke Provinsi Aceh. Sehingga Pemerintah Aceh dapat melakukan perencanaan yang lebih matang dalam kegiatan impor pada masa yang akan datang

terutama pada kondisi pandemi seperti saat ini. Sebagai catatan, nilai ekspor Provinsi Aceh selama masa pandemi juga mengalami penurunan di 22 dari 38 (57,9%) negara tujuan ekspor pada tahun 2020 (Ulya, Anwar, & Zakia, 2022). Kebijakan yang dilakukan beberapa negara maju adalah dengan melakukan kebijakan *lockdown* yaitu penutupan akses suatu daerah baik dari dalam maupun dari luar. Untuk Indonesia di berbagai provinsi termasuk Provinsi Aceh, kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan PSBB (Pergerakan Sosial Berskala Besar) sehingga hal ini mempersempit pergerakan ekonomi dan selain itu banyak pabrik yang menutup produksinya karena beberapa karyawannya terkena dampak covid-19 sehingga produksi tidak dapat berjalan dengan baik. Namun setelah kondisi berjalan normal setelah Covid-19 perekonomian mengalami peningkatan apalagi dalam hal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh yang meningkat drastis dilihat dari laju pertumbuhan kembali naik menjadi 2,79 persen serta kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,21 persen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan terdapat perbedaan Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh, dengan nilai sig. (2-tailed) $0.041 < 0.05$. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di Provinsi Aceh. Pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, dan perubahan perilaku konsumen mengakibatkan penurunan produksi dan pendapatan pada banyak sektor sehingga produksi barang dan jasa terbatas. Sektor pariwisata dan perhotelan yang mengalami penurunan yang signifikan karena penurunan jumlah wisatawan dan pembatasan perjalanan. Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Veni Karina (2022) yang mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah dengan menggunakan data PDRB. Penelitian ini menemukan bahwa pandemi telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang

signifikan di hampir semua daerah, dengan variasi dampak tergantung pada struktur ekonomi dan ketahanan sektor-sektor tertentu.

Adapun saran yang dapat diberikan sebaiknya pemerintah Provinsi Aceh memperhatikan lagi apakah pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan angka ketimpangan pendapatan. Diharapkan pula kepada pemerintah agar dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan memperlebar distribusi pendapatan nasional maupun regional, terutama pada saat pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Analisis Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprpto, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(4), 542–469. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.97>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2022. *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2022*. Jakarta: DJPK Kementerian keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19)-Rev-5*. Kementerian Kesehatan RI.
- Khalwaty, T. (2019). *Inflasi Dan Solusinya*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perekonomian Strategi Dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Saberan, H. (2002). *Produk Domestik Regional Bruto*. Rajawali Pers.
- Sudjana. (2016). *Metode Statistik*. Rineka Cipta.
- Sufriadi, D., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2015). Analisis Transformasi Struktural Perekonomian Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(2), 65–73.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi. Jilid I Edisi Kesembilan*. Erlangga.
- Ulya, I. Y., Anwar, S., & Zakia, U. (2022). Perbandingan Realisasi Nilai Ekspor Provinsi Aceh Berdasarkan Pengelompokan Negara Tujuan Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(11), 1349–1359.
- Widiyanto, A. (2013). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 – 2010. *Jurnal Berkala Efisiensi*.
- Widodo, D. F. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Kesenjangan Pendapatan Di Sulawesi. Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.